

KPK Pamerkan Kasus Noel di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Soroti Korupsi di Kemnaker

Category: NASIONAL

written by Redaksi | October 21, 2025



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dua kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lembaga antirasuah itu menegaskan, langkah penindakan ini bukan hanya sekadar menunjukkan kinerja, tetapi juga menjadi peringatan agar pelayanan publik terbebas dari praktik koruptif.

Dalam paparan evaluasi tahunan, KPK memamerkan dua perkara besar yang ditangani sepanjang 2025. Pertama, dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kedua, kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel. Dua kasus ini dianggap mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Penangkapan Noel melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sempat menyita perhatian publik. KPK menemukan adanya indikasi kuat bahwa proses sertifikasi K3 disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang seharusnya menjadi garda depan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menjamin keselamatan kerja.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi, supervisi, serta pendidikan antikorupsi. Ia menambahkan bahwa KPK mendorong setiap instansi pemerintah, termasuk Kemnaker, untuk memperbaiki sistem agar celah pelanggaran bisa ditutup sejak dini.

KPK juga mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan sektor yang paling rawan disusupi praktik pungutan liar. Oleh karena itu, perbaikan sistem administrasi dan transparansi menjadi langkah penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Langkah ini dianggap sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan birokrasi bersih dan efisien.

Dalam konteks politik, pengungkapan kasus Noel menandai tahun pertama pemerintahan baru dengan catatan penting bagi publik: masih banyak pekerjaan rumah dalam pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. Pemerintah diharapkan tidak hanya mendukung penindakan, tetapi juga mempercepat reformasi birokrasi agar praktik korupsi tidak berulang di masa mendatang.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi lembaga-lembaga pemerintah strategis. Kasus Noel di Kemnaker menjadi contoh nyata bahwa pengawasan dan ketegasan hukum tetap menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan sinergi antarinstansi, KPK berharap upaya pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.[]